

Kegiatan Alat Kelengkapan DPR-RI Minggu Pertama Agustus 2011

Masa Sidang IV 2010-2011 telah berakhir pada 22 Juli 2011 dan telah memasuki Masa Reses IV 2010-2011 hingga 15 Agustus 2011. Konsentrasi kegiatan Dewan pada Masa Reses ini adalah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Berikut pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yang kami ringkaskan.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPR

Pada hari terakhir penutupan Masa Sidang IV, ada 3 agenda pokok, yaitu Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembicaraan Tingkat II RUU tentang APBN Perubahan TA 2011, dan pidato Penutupan Masa Sidang IV.

Dalam laporan Ketua Pansus RUU tentang Peraturan Perundang-undangan, antara lain di sebutkan: [1] Bahwa RUU ini sangat penting bagi praktek penyelenggaraan pemerintahan, karena UU ini dapat dikatakan sebagai "Undang-Undang Pokok" yang menjadi acuan dan pedoman bagi semua lembaga negara dan Pemerintah yang memiliki kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan. [2] UU ini juga sangat penting karena menjadi bagian penting dari prinsip negara hukum yang menganut tradisi hukum tertulis. UU ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 45 tentang perlunya pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU.

[3] RUU ini merupakan usul inisiatif DPR yang di prakasai oleh Badan Legislasi DPR. Usul pembentukan UU ini didasarkan pada evaluasi terhadap UU No. 10 Tahun 2004, yang ternyata setelah kurang lebih tujuh tahun berlakunya terdapat banyak kelemahan. Kelemahan tersebut telah menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan tehnik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten. Disamping itu terdapat perkembangan-perkembangan dalam praktek ketatanegaraan yang belum tertampung dalam UU yang lama. [4] Penyempurnaan atas UU sebelumnya tertuang dalam muatan



materi baru antara lain: penambahan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD 45; perluasan cakupan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga Perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan perundangan lainnya; pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peneliti dan Tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam agenda kedua sebelum RUU Tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 2010 Tentang APBN tahun Angga-

ran 2011 disetujui, Ketua Banggar melaporkan bahwa telah dicapai kesepakatan Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU Perubahan UU No. 10 Tahun 2001 tentang asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak, dan lifting minyak.

Dalam laporan Ketua Banggar, telah disampaikan Pandangan Fraksi-fraksi sebagai sikap akhir atas RUU ini, yaitu sebagai berikut: Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Hanura menilai bahwa pertumbuhan ekonomi masih dapat ditingkatkan melampaui angka 6,5%. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi PKB menilai angka pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sudah realistis dan dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional. sementara Fraksi PDI Perjuangan justru pesimis dan berpandangan sebaliknya.

Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra mendesak dan mengharapkan Pemerintah dapat lebih serius dalam men-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/be-rita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KE-TUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIM-PINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER:** Eka Hindra **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

capai dan meningkatkan target lifting nasional. Hampir seluruh fraksi berpendapat bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, Pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sektor perpajakan, menindak tegas para pengemplang pajak, serta reformasi di bidang pengawasan.

Terkait masalah subsidi, hampir seluruh fraksi mendorong Pemerintah untuk membenahi kebijakan pemberian subsidi untuk mengurangi beban anggaran negara. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS dan Fraksi PPP menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, dan mengharapkan upaya yang lebih kongkrit dari Pemerintah dalam menaggulangi permasalahan ini.

Agenda ketiga dari Rapat Paripurna 22 Juli adalah Pidato Penutupan Masa Sidang IV tahun sidang 2010-2011. Dalam pidato penutupan ini, Ketua menyampaikan evaluasi tentang pelaksanaan tiga fungsi DPR. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, selama kurun waktu satu tahun ini, Dewan mengamati dengan seksama berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian serius, terutama berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah pertama yang menuntut perhatian kita semua adalah gejala luntarnya nilai-nilai ideologi Pancasila. Hal ini ditengarai dengan makin mudurnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, terutama para generasi muda. Mudurnya ideologi Pancasila itu ditandai dengan makin maraknya aksi-aksi kekerasan di kalangan masyarakat. Kita sering menyaksikan konflik diantara berbagai kelompok masyarakat, kecenderungan pada penyelesaian tanpa mampu menghormati lagi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Memperhatikan kondisi yang makin memprihatinkan, Dewan mendesak pemerintah agar segera menciptakan harmoni di kalangan masyarakat, bertindak tegas terhadap setiap aksi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, harus ditanamkan, dijaga dan dilestarikan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa. Pancasila yang menyatukan, merekatkan, membangun, menyemangati, dan meneguhkan bangsa, harus kembali menjadi jati diri ideologi bangsa dan negara. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menjadikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional dan melalui kebudayaan rakyat, serta dengan mendorong semua orang untuk menjadi teladan kejujuran bagi semua orang.



Makin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di hampir semua lini, baik di birokrasi pemerintahan, lembaga-lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum, menjadi keprihatinan bersama. Masyarakat sering tidak puas terhadap penanganan berbagai kasus oleh aparat penegak hukum. Di lembaga penegak hukum, yaitu lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian, yang semula diharapkan dapat menjadi benteng terakhir penegakan hukum, kondisinya juga sama.

Dalam Masa Sidang ini, Komisi II Dewan telah membentuk Panitia Kerja Mafia Pemilu. Pembentukan Panja ini dimaksudkan untuk dapat mendalami persoalan kinerja KPU dan Bawaslu dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPR hasil Pemilu 2009, termasuk untuk mendapat klarifikasi dalam menentukan langkah-langkah dalam hal pengawasan Pemilu. Panja telah bekerja secara intens, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi makin tertibnya pelaksanaan Pemilu 2014.

Masih lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap para tenaga kerja kita yang berada di luar negeri, menjadi keprihatinan Dewan. Terkait dengan keselamatan dan perlindungan TKI di luar negeri, DPR-RI telah membentuk Tim Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Atas temuan Tim khusus, DPR-RI telah merekomendasi kepada Pemerintah antara lain: *Pertama*, menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. *Kedua*, moratorium diakhiri setelah Pemerintah melakukan pembenahan kelembagaan terutama di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI. *Ketiga*, membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) dengan penugasan khusus menangani 303 orang TKI yang saat ini terancam hukuman mati terutama di Arab Saudi dan Malaysia.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak luput



Suasana Rapat Paripuna DPR

dari perhatian Dewan. UN sebagai salah satu sarana untuk mengukur kualitas pendidikan sudah seharusnya dievaluasi setiap tahun, agar kualitas pendidikan makin meningkat. Dewan bersepakat bahwa, kebijakan UN bukan lagi sebagai satu-satunya penentu kelulusan, karena penilaian kelulusan adalah dengan penggabungan antara nilai ujian dengan nilai rapor.

Namun disayangkan, dalam pelaksanaan UN masih saja terjadi kecurangan dan penyimpangan di sana-sini, baik secara parsial maupun sistemik. Dimensi politik di daerah juga ikut mendorong terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN, sehingga prinsip pendidikan yang seharusnya mengedepankan proses transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi kontradiktif dengan realitas yang terjadi.

Diplomasi Parlemen

Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Senin 25 Juli 2011, menerima delegasi dari Pemerintah Libya Dr. Abdolkabir M Alfakhry dan rombongan. Pada kesempatan ini, Abdolkabir menyampaikan banyak hal mengenai kondisi politik dan konflik politik yang terjadi di Libya. Menurutnya, krisis politik yang sedang terjadi di Libya bukan kehendak dari masyarakat atau rakyatnya sendiri, melainkan campur tangan asing yang ikut terlibat dalam situasi politik di Libya. Negara-negara Barat melakukan serangan dengan dalih Resolusi PBB.

Abdolkabir banyak menceritakan, bahkan secara detail, tentang kronologis konflik yang terjadi di Libya. Hal ini sebenarnya juga banyak dipengaruhi dengan konflik politik

yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Menurutnya, peristiwa ini berawal pada Februari 2011, dimana banyak informasi antar masyarakat yang dilakukan menyebar melalui Facebook. Informasi tersebut begitu cepat menyebar, dan memberi peluang kepada hadirnya intervensi asing terutama dari negara -negara Barat. Bahkan, Abdolkabir menyebutkan ada keterlibatan sel-sel al-Qaida dalam konflik saat ini.

Oleh Abdolkabir, kronologis yang disampaikan-nya banyak yang belum terungkap oleh media, sehingga Pemerintah Libya mempersilahkan kepada siapapun untuk melihat kondisi Libya yang sesungguhnya. Sebab, menurut Dr. Abdolkabir, kondisi dalam negerinya cenderung diberitakan tidak benar dan Libya tidak memiliki teknologi informasi yang mampu mengimbangi berita-berita tersebut. Intinya, Pemerintah Libya merasa bahwa kepentingan dan campur tangan asing lah yang memiliki peran besar dalam konflik ini sehingga masyarakatnya gagal menyelesaikan permasalahan dalam negerinya.

Menanggapi Delegasi Libya tersebut, Ketua DPR menyampaikan pentingnya persatuan masyarakat dan rakyat Libya sendiri dalam menyelesaikan persoalannya. Menurut Ketua DPR, masalah dalam negeri hanya bisa diselesaikan oleh rakyatnya sendiri. Dan dalam kesempatan ini, Ketua DPR menyaranakan untuk memperkuat diplomasi Libya agar dalam komunikasi dengan negara-negara Islam terutama, dapat terjalin dengan baik. Libya yang penduduknya mayoritas muslim harus memperkuat persatuan Islam, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya bersama-sama. Tidak ada gunanya kekayaan alam sebuah negara, dimana rakyatnya tidak bersatu dan justru menjadi obyek intervensi negara asing.*

Komisi VIII Dukung Pembentukan Embarkasi Haji Prov. Banten

Pertemuan berlangsung di kantor Kanwil Kemenag, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov. Banten (KP3B) Jl. Raya Pal Lima-Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01 Banten (26/7).

Ka Kanwil Kemenag prov. Banten, Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd. dalam sambutannya mengatakan, provinsi Banten meskipun memiliki bandara bertaraf internasional (Soekarno-Hatta International Airport) tetapi hingga saat ini belum memiliki embarkasi haji tersendiri dan masih bergabung dengan embarkasi Jakarta. "Jamaah haji prov. Banten harus ke Jakarta terlebih dahulu untuk embarkasi, kemudian kembali ke prov. Banten untuk terbang menuju Arab Saudi", jelasnya.

Terkait usulan pembentukan embarkasi haji Banten, H. Iding mengaku telah mengajukan usulan tersebut kepada kementerian agama, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Untuk itu dirinya meminta bantuan anggota Komisi VIII untuk membantu mendorong percepatan pembangunan embarkasi Banten ini saat Raker atau RDP dengan kementerian terkait. H. Iding juga mengungkapkan terima kasih dan penghargaannya kepada Panja Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR yang telah menyelesaikan pembahasan BPIH sekaligus menetapkan angka BPIH.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Hj. Chairun Nisa mengatakan, Usulan mengenai rencana pembentukan embarkasi prov. Banten merupakan temuan yang akan dibawa Komisi VIII saat rapat kerja dan RDP dengan kementerian terkait. "Kami akan membahas soal ini pada rapat kerja dengan kementerian agama pada masa sidang yang akan datang," jelasnya. Chairun Nisa menginformasikan bahwa angka Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah disepakati DPR dan pemerintah adalah 30.777.900 rupiah, "angka ini lebih murah dari angka tahun lalu sekitar 300 ribu rupiah,"

Hal itu mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Hj. Chairun Nisa (F-PG) dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI provinsi Banten, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se provinsi Banten, para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) prov. Banten, serta tokoh masyarakat dan wakil organisasi kemasyarakatan yang terdapat di prov. Banten.



Pertemuan di kantor Kanwil Kemenag Prov. Banten antara Komisi VIII DPR dan jajaran Pemerintahan Banten ungkap praktisi partai Golkar ini.

Pada Kunjungan Kerja ke prov. Banten ini, turut serta anggota Komisi VIII, yaitu: Hj. Nani Sulistyani Herawati (F-PD), H. Zulkarnanen Djabar (F-PG), H. Humaedi (F-PG), Hj. Herlini Amran (F-PKS), H. Abdul Rozaq Rais (F-PAN), H. Endang Sukendar (F-PPP), dan Saifudin Donodjojo (F-Gerindra). Turut mendampingi beberapa pejabat dari kementerian/lembaga mitra komisi terkait.

Terkait anggaran, Ketua Tim Chairun Nisa mengatakan, sejak lama Komisi VIII menginginkan agar anggaran fungsi keagamaan dinaikkan menjadi 10%, di mana sebelumnya hanya 5% dari total anggaran yang diterima Kemenag tahun 2010 sebesar 31 triliun rupiah. "Kami ingin agar pendidikan keagamaan bisa disejajarkan dengan pendidikan umum, dari sisi anggaran

maupun sarana dan prasarana sekolah," harapnya.

Pertemuan malam itu ditutup dengan penyerahan secara simbolik bantuan dari Ditjen Pendidikan Islam untuk TK Islam, MI, Mts, dan MA, dari Ditjen Bimas untuk pembangunan masjid, Ditjen Bimas Kristen untuk gereja dan sekolah, Ditjen Bimas Budha serta Hindu dengan total bantuan sebesar 5,3 milyar rupiah.

Sebelum melakukan pertemuan dengan kakanwil kemenag prov. Banten, siang harinya rombongan sempat meninjau dan berdiskusi dengan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Prof Dr. Sybli Syarjaya beserta civitas akademika IAIN SMH. Pada pagi harinya Tim mengunjungi sekaligus melakukan pertemuan dengan pimpinan dan staf pengajar MAN 2 Serang. (Rn,Tvp) foto: Rn/parle

Komisi VIII DPR Meminta Anggaran Sosial Perusahaan digunakan untuk Program Pengentasan Kemiskinan

Tim Kunjungan Komisi VIII DPR yang berkunjung ke Provinsi Banten meminta agar perusahaan-perusahaan yang terdapat di Cilegon, Serang dan sekitarnya, mau mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau anggaran tanggungjawab sosial perusahaan mereka untuk program pengentasan kemiskinan, terutama di daerah sekitar perusahaan itu berada.

Hal itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII melakukan pertemuan dengan Direksi PT. Krakatau Steel Tbk. dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk yang berlangsung di ruang pertemuan Hotel Permata Krakatau Cilegon kemarin (25/7).

Pimpinan rombongan Komisi VIII DPR RI, Zulkarnaen Djabar (F-PG) mengatakan, DPR baru saja mengesahkan UU tentang Penanganan Fakir Miskin. UU ini merupakan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 di mana dinyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. "UU mewajibkan seluruh pihak tidak hanya pemerintah, masyarakat juga pengusaha untuk bertanggungjawab menuntaskan kemiskinan," ujarnya menjelaskan.

Zulkarnaen memaparkan, Dari berbagai data yang telah dikumpulkan tim Panja, ada sekitar 17 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 50 juta jiwa yang tergolong miskin (Poor), yakni mereka yang punya penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara yang sangat miskin (very poor) ada 3,5 juta RTS atau sekitar 10 juta jiwa yang membutuhkan perhatian ekstra. Pelaksanaan CSR hingga saat ini belum diatur dengan

UU. Dengan telah disahkannya UU tentang Penangan Fakir Miskin ini dirinya berharap ke depan dana CSR bisa lebih tepat sasaran dan jelas penggunaannya. "Jika dana CSR perusahaan-perusahaan di prov. Banten ini dikumpulkan, saya yakin tidak akan ada lagi orang miskin di Banten," tegasnya.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Fazwar Bujang dalam presentasinya mengungkapkan, PT. KS mempunyai kapasitas produksi 2,7 juta ton baja lembaran canai panas dan dingin, serta wire rod, dengan total penjualan mencapai 1,8-2 milyar dollar Amerika. Fazwar menginformasikan, perusahaannya pada tahun 2010 telah mengeluarkan dana CSR 21 milyar rupiah, dengan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) ke depan direncanakan akan ditambah. Sementara Vice President PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk Suhad Miyarso memaparkan, perusahaannya telah mengeluarkan sekitar 10 milyar rupiah untuk CSR, dengan target utama meningkatkan kualitas SDM yang berlangsung sejak tahun 1995. Suhad menjelaskan program CSR diantaranya berupa pemberian susu dan makanan tambahan bagi 2000 balita di 19 kecamatan di Cilegon, Serang dan sekitarnya. "Jika balitanya sehat, niscaya anak-anak mudanya akan menjadi sehat," jelasnya.

Usai melakukan pertemuan dilakukan peninjauan lapangan ke kawasan pabrik PT. Krakatau Steel Tbk. dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke prov. Banten dipimpin oleh Hj. Chairun Nisa (Wakil Ketua/F-PG), dengan anggota : Hj. Nani Sulistyani Herawati (F-PD), H. Zulkarnan Djabar (F-PG), H. Humaedi (F-PG), Hj. Herlini Amran (F-PKS), H. Abdul Rozaq Rais (F-PAN), H. Endang Sukendar (F-PPP), dan Saifudin Donodjojo (F-Gerindra). (Rn,Tvp) foto:Rn/parle



Tim Komisi VIII DPR saat melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten

DPR Beri Perhatian Hilangnya Manuskrip Bernilai Tinggi Aceh

“Manuskrip yang sudah pindah tangan ini sulit, apalagi dikuasai negara lain. Sebenarnya kita sudah mempunyai UU Cagar Budaya untuk memagari kekayaan budaya kita seperti manuskrip, situs, dan lain-lain. Tapi untuk mendapatkan kembali 5000 manuskrip yang dikuasai Malaysia dan ratusan di Brunai itu sulit, tetapi paling tidak langkah kita kedepan jangan sampai kejadian ini terulang,” kata Ketua Tim Kunker Komisi X di NAD, Utut Adianto.

Dalam penjelasannya Wakil Gubernur Aceh menyebut sejarah mencatat Negeri Serambi Mekah ini dahulu adalah kerajaan besar yang memperhatikan intelektualitas, termasuk karya dalam bentuk tulisan seperti kitab kuno tentang ilmu agama, medika, seni perang serta politik. “Kita kecolongan di bidang kebudayaan, 5000 manuskrip Aceh hilang, baik dibeli atau dicuri oleh Malaysia. Mereka beli dengan harga mahal, pemerintah kurang memperhatikan hal ini. Bagi saya manuskrip lebih penting dari apapun, karena ini peradaban,” tandasnya.

M. Nazar menyebut Malaysia saat ini sedang membangun pusat manuskrip terbesar di Asia, koleksinya mayoritas berasal dari Aceh. Pada abad ke 15-19 beberapa bagian Malaysia, seperti Perak, Johor, Pahang dibawah pengendalian Aceh. Kondisi ini berubah setelah penjajah Belanda datang. Ia menyadari untuk mengembalikan kembali kekayaan budaya ini sulit, namun potensi negeri rencong ini untuk menjual wisata sejarah tentu akan berkurang. “Kita bisa contoh turki yang sukses mengkapitalkan sejarah, menjualnya kepada para turis. Kita belum berhasil lakukan di Indonesia yang cenderung hanya jual Bali,” ujarnya.

Di Aceh, pada abad 16-17 terdapat cukup banyak penulis manuskrip. Misalnya, Hamzah Fansuri, yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada

Keperihatinan mengemuka ketika Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI mendapat laporan telah dikuasainya ribuan manuskrip Aceh oleh negara tetangga Malaysia dan Brunai Darussalam. Wakil Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nazar menyampaikan hal ini dalam pertemuan di Kantor Gubernur NAD di Aceh, Selasa (26/7/2011).



Pertemuan di Kantor Gubernur Aceh antara Komisi X DPR dengan Wakil Gubernur Aceh

masanya. Kemudian ada Syekh Nuruddin ar-Raniri alias Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu ‘Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi. Ia dikenal sebagai ulama yang juga bertugas menjadi Qadhi al-Malik al-Adil dan Mufti Muaddam di Kesultanan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani abad 16. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul “Bustanul Salatin”.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Raihan Iskandar mengatakan UU Cagar Budaya yang baru saja diselesaikan DPR beranjak dari kekhawatiran banyaknya benda-benda cagar budaya seperti manuskrip dibeli oleh pihak luar. Bahkan ketika tsunami menghancurkan gedung arsip Aceh di Blang Padang, ia mendapat masukan beberapa benda bernilai sejarah tinggi hilang, kemudian diperdagangkan.

“Kita berharap pemerintah di dae-

rah lebih pro aktif tidak cuma melakukan keluh kesah atau menanti dana mengalir dari atas. Dalam UU ada ancaman kalau pemerintah tidak peduli cagar budaya kena sanksi,” kata politisi dari dapil NAD tersebut. Ia meminta aparat pemerintah segera menuntaskan proses registrasi nasional terhadap seluruh benda cagar budaya di seluruh tanah air, sebagaimana diamanatkan undang undang. Apabila telah terdata, kasus hilangnya manuskrip Aceh bisa diatasi karena memiliki bukti kepemilikan.

Pendidikan Aceh Bangkit Pasca Tsunami

Sementara itu anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumarijanto memberikan apresiasi pada jajaran pendidikan di Aceh yang telah berhasil bangkit setelah bencana tsunami. “Catatan

yang saya miliki bencana yang menarik perhatian dunia itu telah merusak 2000 sekolah, 2500 guru meninggal. Pada kunjungan kedua saya ke Aceh pasca tsunami, saya lihat pembangunan yang didukung masyarakat internasional tersebut sangat fantastis perkembangannya,” ujarnya.

Ia meminta segenap pihak di Aceh dapat mempertahankan capaian ini sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat dunia yang telah banyak membantu. Politisi PDIP ini berharap peran para guru dapat dioptimalkan dalam proses kebangkitan Aceh. Para guru menurutnya perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diberi peluang mempelajari pendidikan di negara lain untuk membuka pemahaman terhadap beragam permasalahan pendidikan.

Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Nuroji meminta pemerintah provinsi Aceh lebih banyak membangun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Baginya langkah ini dapat jadi solusi bagi masyarakat terutama generasi muda untuk segera memasuki lapangan pekerjaan. “SMK bisa dibangun lebih banyak, bagi saya ini dapat segera mendukung rakyat Aceh.”

Wakil Gubernur Aceh, M. Nazar mengatakan pendidikan merupakan prioritas sehingga kebijakan anggaran sudah mencapai 20 persen. Peran penting sekolah kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai membuat pilihan membangun sekolah kejuruan menjadi pilihan. Bekerja sama dengan Jerman yang dinilai berpengalaman, telah dibangun beberapa SMK baru. “Jerman kita pilih karena disana 80 persen sekolah menengah mereka adalah SMK.”

Data pemerintah menunjukkan provinsi terbanyak yang mengirim mahasiswa untuk belajar di Timur Tengah adalah provinsi Aceh, tidak kurang dari 500 mahasiswa. Disana menurut wagub mereka tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga disiplin ilmu lain seperti tehnik. Untuk mendukung anak yatim yang kehilangan orang tua pada saat bencana tsunami, pemprov juga telah menyiapkan beasiswa untuk 80 ribu anak senilai 1,8 juta rupiah pertahun. Wagub menyebut program ini sebagai terobosan. (iky)foto:iky

DPR Tekankan Tujuh Program Renstra DPR

Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang mengatakan, DPR mendorong 7 program agenda prioritas diantaranya, penguatan kelembagaan DPR dengan membentuk badan Fungsional Keahlian.



Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang

Kemudian, dari sisi unit pengawasan internal. Perlu didorong penguatan pengawasan internal, dengan membentuk unit pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI melalui BURT dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekjen DPR RI.

“Selama ini pengawasan internal hanya eselon III artinya bagaimana mengawasi Sekjen yang notabene eselon I, karena itu perlu ditingkatkan sejenis Inspektorat Jenderal,”paparnya saat menyampaikan pidatonya dihadapan peserta parlemen remaja 2011 di Kopo, baru-baru ini.

Kemudian reformasi kesekjen mencakup kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia. Prioritas pencapaian diantaranya penguatan kehumasan DPR RI yaitu membangun sistem kehumasan yang terintegrasi dan terkoordinasi sehingga menghindari munculnya kesalahpahaman.

Dia menambahkan, perlu adanya kemandirian pengelolaan anggaran DPR RI. Serta mendorong upaya penguatan lembaga negara melalui kemandirian pengelolaan, termasuk anggaran.

Pengembangan prasarana utama, lanjut Pius, diantaranya membangun kondisi prasarana utama yang saat ini tidak memadai dan melebihi kapasitas. “Kemudian Perpustakaan Parlemen diantaranya membangun perpustakaan yang memadai,”tambahnya.

Penguatan sarana representasi, jelasnya, membentuk rumah aspirasi yang terkait tugas-tugas anggota dewan dalam merepresentasikan konstituen yang diwakilinya.

Terakhir yaitu, mengembangkan E-parliament, berusaha membangun sistem komunikasi berbasis ICT sebagai perangkat penting penyediaan akses informasi bagi anggota dan masyarakat. (si)/foto:iw/parle.

Ketua DPR Terima Dubes Serbia

Ketua DPR Marzuki Alie menerima kedatangan Duta Besar Serbia Zoran Kazazovic di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (26/7)

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Serbia Zoran Kazazovic menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini, dalam rangka mengakhiri masa tugasnya sebagai Dubes di Indonesia yang telah ia jabat selama 6 tahun 7 bulan.

“Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Ketua DPR, dan sesungguhnya saya pun merasa sedih, karena hari ini adalah hari perpisahan dan terakhir saya sebagai Dubes di Indonesia, jabatannya saya kali ini, merupakan tugas terpanjang yakni selama 6 tahun 7 bulan,” kata Zoran

Lebih lanjut ia menambahkan, bah-

wa meski sedih akan meninggalkan Indonesia, dirinya merasa puas, atas apa yang telah kedua negara capai secara bersama-sama, dan dalam berbagai hubungan kerjasama, ia berharap hubungan yang telah terjalin baik ini, dapat terus terjaga hingga kedepannya.

“Saya meninggalkan Indonesia dengan perasaan puas, karena banyak hal yang telah kita capai dalam hubungan bilateral antar kedua negara ini, dan dapat memeliharanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu hubungan terpenting yang harus tetap dijaga adalah membangun kerjasama ekonomi antar kedua negara.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie, memberi ucapan selamat bahwa kepada Dubes Serbia yang telah berhasil membawa misinya dalam rangka terciptanya peningkatan hubungan bilateral didalam berbagai aspek. dan diharapkan dapat kembali

berkunjung ke Indonesia.

“Memang kerjasama dalam bidang Politik merupakan basis dalam bidang kerjasama lainnya, namun yang paling penting, adalah bagaimana hubungan ekonomi diantara kedua negara dapat terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan kontribusi demi kesejahteraan raakyat di kedua negara,” jelas Marzuki Alie.

Marzuki yakin, dimana sebelumnya telah Menlu kedua negara telah melakukan pertemuan, dapat menimbulkan kesepahaman dari kedua negara dalam menyelesaikan segala masalah, juga dalam meningkatkan hubungan antar kedua negara yakni Indonesia dan Serbia.

Diakhir pertemuan, Ketua DPR berterima kasih atas kedatangan Dubes Serbia untuk berpamitan dan diharapkan dapat kembali lagi mengunjungi Indonesia.(nt)/foto:iw/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) saat menerima Duta Besar Serbia Zoran Kazazovic di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III DPR

Keluarga Miskin Minahasa Selatan Terima Bantuan PKH Senilai Rp 4,7 Miliar

Sebanyak 3.718 kepala keluarga (KK) dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan menerima dana bantuan Peserta Keluarga Harapan (PKH) senilai total Rp 4,7 miliar.



penyerahan bantuan tunai dari Kementerian Sosial oleh Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Karding (kiri) kepada perwakilan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan

Bantuan tunai dari Kementerian Sosial ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding kepada perwakilan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan, hari ini (Rabu, 27/7).

Abdul Kadir Karding mengharapkan dana bantuan tunia tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Karena bantuan itu bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat sangat miskin. Untuk diketahui, tercatat 9874 kepala keluarga sangat miskin (RTSM) tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Abdul menjelaskan, besaran bantuan PKH yang diberikan pada ibu RTSM beragam. Tergantung kondisi keluarga dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan PKH. Setiap RTSM bisa mendapat dana PKH sampai Rp 2,2 juta pertahun. Ada pula yang Rp 600 ribu pertahun. Secara terperinci, ibu rumah tangga penerima

PKH mendapat bantuan tetap pertahun sebesar Rp 200 ribu. Kemudian jika mempunyai anak yang menempuh pendidikan SD/MI ditambah sebesar Rp 400 ribu. Sementara untuk pendidikan SMP/MTs senilai Rp 800 ribu dan bantuan kesejatan ibu hamil/nifas atau balita sebesar Rp 800 ribu per tahunnya

Dalam kesempatan itu, Karding bersama delapan anggota Komisi VIII DPR lainnya juga menyerahkan bantuan tunai bagi warga yang mengalami cacat mental tetap dan lanjut usia. Disamping menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp 900 juta kepada 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Masing-masing kelompok mendapat Rp 30 juta.

Lebih lanjut, Karding mengatakan, dengan disahkan UU Penanganan Fakir Miskin di Paripurna DPR pekan lalu, diharapkan pemerintah di masa mendatang lebih memperhatikan masyarakat miskin.

“Bukan hanya dengan program charity, yang setelah dibagikan akan habis dan masyarakat tetap miskin. Namun dengan memberdayakan dan membantu masyarakat dengan program bantuan usaha,” ujar Karding dalam sambutannya.

Menurut dia, mayoritas masyarakat miskin bukan lantaran malas, tapi keadaan dan kebijakan yang kurang memberi ruang bagi mereka untuk berusaha. Karenanya, melalui pembentukan KUBE diharapkan dapat menjadi pemecah kebuntuan masalah pengentasan kemiskinan selama ini.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR ini diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, MC Kairupan di kantor Bupati Minahasa Selatan. Delapan anggota Komisi VIII DPR yang ikut mendampingi Karding, yakni Adji Farida Padmo, Yetty Heryati, Kasma Bouty, Muhammad Lutfi, Ina Ammania, Rukmini Buchori, Achmad Rubaie dan Muhammad Lufty.(Rd) foto:rd/parle

Komisi X DPR Dukung Visit Banten 2013

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Selasa (26/7) dihadapan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dan segenap unsur pelaku pariwisata dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan jajarannya.

Rully mengatakan, banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan di daerah ini dan sangat disayangkan jika potensi ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak sekali kawasan pariwisata yang unik di provinsi ini yang dapat menjadi sumber devisa daerah. Banten memiliki gunung, pantai, wisata ziarah, cagar budaya, ujung kulon, suku Baduy dan masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan.

Ditinjau dari segi geografis, Banten juga berada di wilayah yang sangat strategis yang merupakan jalur lalu lintas padat yang akan menyeberang ke Sumatera. "Alangkah sayangnya jika potensi ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Namun sangat disayangkan dari berbagai penyebab tidak berkembangnya pariwisata di daerah ini salah satunya adalah sumber daya manusia. Untuk itu Rully berharap, Pemerintah Daerah memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah tujuan wisata andalan setelah Bali dan Yogyakarta.

Rully juga berharap, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat dapat terus meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan serta kualitas SDM aparatnya dan menyadarkan masyarakat bahwa pariwisata dapat menjadi sumber devisa andalan daerahnya.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten Egi Djanuiswaty mengakui, pariwisata di Provinsi Banten memang belum dapat disejajarkan dengan pariwisata di Bali dan Yogyakarta.

Komisi X DPR mendukung rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk mencanangkan Visit Banten 2013. Pencanangan ini merupakan langkah signifikan yang diambil Dinas Pariwisata untuk mengembangkan wisata daerahnya dan tentunya Komisi X akan mendukung program tersebut.



Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chirul Azwar saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Banten

Egi mengakui masyarakat Bali sangat sadar pariwisata merupakan sumber devisa terbesar dan mereka betul-betul menyadari bahwa pariwisata dapat dijadikan sumber mata pencaharian utama. "Namun kesadaran inilah yang belum dimiliki masyarakat di Banten," kata Egi.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2007-2010 kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Jika tahun 2007 wisatawan nusantara yang berkunjung 22.373.206 orang, tahun 2010 meningkat menjadi 48.042.531.

Sedangkan wisatawan mancanegara juga mengalami kenaikan dari tahun 2007 berjumlah 99.603 orang, tahun 2010 mencapai 148.046 orang.

Dari sektor pariwisata ini, kata egi,

dari tahun ke tahun juga memberikan kontribusi yang terus meningkat, di tahun 2009/2010 mencapai kurang lebih Rp 4,68 triliun dan dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada sekitar tiga juta orang.

Pihaknya, kata Egi, akan terus meningkatkan pariwisata daerahnya agar sejajar dengan potensi wisata di daerah lainnya khususnya Bali dan Yogyakarta. Terkait dengan Pencanangan Visit Banten 2013, Egi mengatakan, ini merupakan langkah berani yang diambilnya untuk dapat meningkatkan potensi wisata daerahnya. Alasan dicanangkan di tahun 2013 menurut Egi, tahun tersebut bersamaan dengan 130 tahun meletusnya Gunung Krakatau. Momen ini diharap dapat dijadikan momentum penting bagi perkembangan wisatawan di Banten.

Egi mengakui selain terkendala ma-

salah SDM, kendala lainnya yang dihadapi adalah rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan.

Selain itu keterpaduan penataan,

pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan pelestarian budaya.

Egi berharap, dalam lima tahun ke depan Provinsi Banten dapat terwujud sebagai salah satu destinasi (daerah tujuan wisata) unggulan yang dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. (tt) foto:tt

RUU Ormas Sah Menjadi Usul Inisiatif Baleg

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima hasil kerja Panja Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan memutuskan RUU ini menjadi usul inisiatif Badan Legislasi. Laporan hasil kerja Panja ini disampaikan Ketua Panja RUU Ormas, Sunardi Ayub, Selasa (19/7) di gedung DPR.



Salah satu organisasi masyarakat di Indonesia

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono, Ketua Panja Sunardi Ayub mengatakan, RUU yang akan dibahas ini merupakan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. RUU ini masuk dalam salah satu Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011 yang menjadi tugas DPR bersama-sama dengan Pemerintah untuk segera dilakukan pembahasan.

Sunardi menambahkan, untuk menyempurnakan draft RUU dimak-

sud, Panja telah melakukan rapat dengar pendapat, dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Mabes Polri.

Selain itu, katanya, Panja juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan mengundang beberapa Pakar dari Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan, Ormas Perempuan dan organisasi terkait lainnya. Panja juga telah melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi dari daerah,

yakni ke Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.

Setelah dilakukan kajian secara mendalam atas semua masukan, maka judul RUU yang semula RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah menjadi RUU tentang Organisasi Masyarakat.

Sunardi mengatakan, beberapa substansi/materi muatan yang menjadi diskusi dalam RUU ini diantaranya adalah, mengatur tentang pendirian Ormas, pendaftaran, Hak dan Kewajiban Ormas, keanggotaan, keuangan, Badan Usaha Ormas, Pemberdayaan Ormas, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan larangan.

Selain itu, RUU ini juga mengatur organisasi masyarakat asing tentang bagaimana memperoleh ijin operasional dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri dan mengatur tentang kewajiban dan larangan Ormas Asing, serta sanksi administrasi terhadap pelanggaran Ormas asing.

Tak lupa, RUU ini memuat tentang sanksi, yang mengatur tentang ketentuan mengenai sanksi terhadap Ormas, baik sanksi yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sanksi yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan.

Sanksi ini, kata Sunardi, dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pembekuan dan pembubaran Ormas.

Dengan disetujuinya RUU ini menjadi usul inisiatif Baleg, selanjutnya Baleg akan mengajukan RUU ini ke Sidang Paripurna untuk dapat diputuskan menjadi usul inisiatif DPR. (tt) foto:internet

Pelaku Wisata Banten Diminta Kreatif

Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar saat melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut bersama Tim Komisi X DPR, Selasa (26/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar.

Dedi yang akrab dipanggil Miing ini mengatakan, untuk menjadikan Banten sebagai daerah unggulan wisata dituntut kepemimpinan daerah yang kreatif bukan hanya sebagai seorang birokrat tapi juga seorang manajer.

Menurut Dedi, Provinsi Banten memiliki potensi yang luar biasa hebatnya dari potensi alam, pantai, gunung, tempat-tempat bersejarah, ujung kulon yang terkenal dengan badak bercula satu yang amat langka, suku Baduy dan masih banyak obyek wisata lainnya yang bisa digali.

Namun tentunya, tanpa usaha keras dan komitmen yang kuat serta didukung SDM yang mampu dibidangnya, potensi yang ada itu akan sia-sia belaka.

Untuk dapat bersaing dengan daerah wisata unggulan lainnya menurut Dedi, perlunya menciptakan identitas dulu. Sebagai contoh, Yogya terkenal dengan kota gudeg, Semarang terkenal dengan bandeng prestonya dan Surabaya terkenal dengan bandeng asapnya.

“Jika bandeng presto Semarang dapat begitu terkenalnya sampai di Jakarta, begitu juga dengan gudeg Yogya dan Bandeng Asap Sidoarjo, kenapa Banten tidak bisa,” tanyanya.

Padahal, kata Dedi, Banten juga memiliki oleh-oleh khas seperti Sate Bandeng yang tak kalah lezatnya dengan bandeng-bandeng lainnya. Kenapa tidak bisa sepopuler Bandeng Semarang maupun Sidoarjo,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Di sini ada sesuatu yang salah dalam hal pemasaran. Dan untuk mempromosikan kuliner andalan daerah ini menjadi tugas Dinas Pariwisata serta

Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi pariwisata meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pelaku pariwisata di Provinsi Banten untuk lebih kreatif mengemas sektor pariwisata di daerahnya.



Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar (dua dari kanan) saat memberikan pemaparan mengenai pariwisata di Banten

pelaku sektor pariwisata.

Dedi juga beranggapan Provinsi Banten kurang maksimal menggali potensi wisata kuliner daerahnya. Menurutnya, masih sangat kurang tempat-tempat yang dikemas dengan menarik untuk dijadikan wisata kuliner.

Dia mencontohkan, Provinsi Banten terkenal dengan hasil durian. Jika sepanjang jalan Serang atau yang menuju Rangkasbitung ditata dengan baik menjadi tempat persinggahan menarik untuk makan durian, dia yakin orang-orang Jakarta dan sekitarnya akan berburu durian ke situ.

Namun sayangnya, berdasarkan pengalaman pribadinya saat membeli durian, untuk makan saja tidak disediakan tempat duduk sehingga orang harus jongkok di tepi jalan sambil makan buah durian tersebut.

Seharusnya, jalan tempat dijualnya durian-durian itu dibuatkan tempat duduk yang tidak perlu mahal, tapi cukup nyaman dari bahan bambu dengan atap ilalang, seperti yang ada di beberapa daerah lainnya.

Sambil menjual durian si penjual dapat juga menjual air mineral atau minuman lainnya atau kue-kue pelengkap jualannya. “Jadi tidak saja penjual mendapat untung dari durian, tapi juga untung dari makanan lain,” tambahnya.

Disinilah perlunya kreatifitas bagi pelaku wisata. Dan tentunya untuk memberikan pemahaman kepada penjual-penjual tersebut diperlukan peran serta Dinas Pariwisata dan jajarannya.

Sebagai wujud komitmennya untuk mengembangkan pariwisata Banten, Dedi mengajak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dan seluruh pelaku pariwisata untuk duduk bersama membahas bagaimana memperbaiki pariwisata di Banten agar menjadi salah satu daerah wisata unggulan di Indonesia.

Dedi yang merupakan anggota Komisi X DPR dari Daerah Pemilihan 1 Banten, Pandeglang dan lebak ini sangat concern untuk mengangkat wisata daerahnya sejajar dengan wisata terkenal di tanah air. (tt)foto:tt

Pemprov Banten Diminta Menata Kawasan Banten Lama

Komisi X DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk menata kembali kawasan wisata ziarah Banten lama. Komisi X prihatin melihat kondisi kawasan ini yang terlihat kumuh dikelilingi banyaknya pedagang-pedagang yang tidak tertata dengan baik dan sampah yang berserakan disana sini.

Demikian pengamatan Komisi X DPR saat melakukan kunjungan kerja tiga hari ke Provinsi Banten (25-27 Juli 2011) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar.

Rully mengatakan, sangat disayangkan Kesultanan Banten lama ini merupakan peninggalan sejarah yang sudah terkenal tidak saja di nusantara, tapi juga di mancanegara. Rully sangat prihatin melihat kondisi Banten lama yang merupakan aset bangsa dan Provinsi Banten khususnya.

Dia menambahkan, jika lokasi bersejarah ini dikelola dengan baik akan memberikan dampak besar bagi perkembangan pariwisata di Banten karena sudah memiliki nama yang dikenal masyarakat luas.

“Untung saja di sini ada makam keluarga Sultan Maulana Hasanuddin sehingga tetap dikunjungi masyarakat untuk berziarah. Jika tidak ada daya

tarik itu, saya rasa orang malas untuk datang ke lokasi cagar budaya ini,” kata Rully.

Rully menambahkan, kita telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Amanah UU tersebut menyebutkan kita harus selalu memelihara dan melindungi benda-benda cagar budaya, dan kawasan Kesultanan Banten ini merupakan salah satu situs yang harus tetap dijaga, dipelihara dan dilestarikan keberadaannya.

Keprihatinan yang sama disampaikan anggota Daerah Pemilihan Banten I Dedi Suwandi Gumelar. Dedi mengaku, sebagai orang Banten asli dia merasa sedih dan malu melihat kondisi wisata ziarah Banten lama yang kumuh dan tidak tertata dengan baik.

Padahal Banten lama merupakan aset Banten yang sudah ratusan tahun berdiri, namun pengelolaan dan pemeliharannya kurang diperhatikan sehingga kumuh dan semrawut.

“Ini harus menjadi pemikiran bersama pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang dan juga pihak Kesultanan Banten lama untuk menata lokasi ini agar lebih baik,” kata Dedi.

Dalam menata kawasan ini, dia juga berharap tidak ada tarik menarik kepentingan secara sektoral, karena semua dilakukan dengan tujuan untuk menata kawasan ini lebih indah dan sedap dipandang mata.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Ego Djanuiswaty mengatakan, saat ini pihaknya bersama dinas terkait sedang menyusun rencana untuk menata kawasan Banten lama bersama kawasan peninggalan sejarah lainnya untuk menjadi satu kawasan strategis di Banten.

Saat ini konsep tersebut masih dalam kajian bersama instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Balai Kepurbakalaan, Dinas Sumberdaya Air dan Permukiman Provinsi Banten, Kota Serang dan pihak Kenadziran Banten lama.

“Rencananya kami bersama pihak terkait akan melakukan revitalisasi Banten lama dengan total luas kawasan sekitar 4.900 hektar. Kawasan strategis tersebut nantinya digabungkan dengan kawasan Banten Water Front City,” katanya.

Rencana revitalisasi kawasan Banten lama itu akan digabung dengan sejumlah lokasi wisata sejarah lainnya seperti Benteng Speelwijk, Viahara, Mesjid Pecinan dan sejumlah lokasi peninggalan sejarah lainnya di kawasan tersebut.

Revitalisasi kawasan tersebut sudah dirancang sejak 2009 dan tahun 2011 pihaknya akan melakukan studi banding ke Solo dan Meksar.

“Rencana ini membutuhkan kebersamaan dan komitmen semua pihak yang terkait, sehingga bisa terealisasi dengan baik dan kepariwisataan di Banten akan lebih maju,” kata Egi. (tt) foto:tt/parle



Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar (kanan) menerima cinderamata dari Wakil Gubernur Banten saat melakukan Kunjungan Kerja di Provinsi Banten

Pemerintah Janji Jalankan Undang-Undang Fakir Miskin

Hal itu disampaikan Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri dalam Sidang Paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPR/Korpolkam Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (21/7).

Menurutnya, Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin ini pada hakekatnya ditujukan untuk penanganan fakir miskin melalui pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, bantuan hukum dan pelayanan sosial.

Dia berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin ini sudah disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden, dan selanjutnya pemerintah akan segera menyiapkan beberapa peraturan pemerintah yang diamanatkan penyusunannya oleh undang-undang

Pemerintah berjanji menjalankan dan melaksanakan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dengan mempertajam dan memperluas program-programnya, peningkatan sumber daya manusia dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.



ini, tambahanya.

“Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan landasan hukum bagi kita semua

dalam rangka mengupayakan turunnya jumlah fakir miskin di Indonesia,” jelasnya.(iw)/foto:iw/parle.

Pansus BPJS Terima Usulan Pemerintah Terkait Transformasi Menyeluruh Dicabut

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Pansus BPJS dengan Pemerintah yang dibacakan Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7)

Rapat Kerja Pansus BPJS yang dihadiri enam menteri antara lain Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida

Panitia Khusus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus BPJS) DPR-RI akhirnya menerima usulan Pemerintah yang meminta transformasi menyeluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Asuransi menjadi BPJS dicabut. Transformasi menyeluruh merupakan kesepakatan Rapat Panja BPJS dengan Pemerintah.

Alisjhabana juga sepakat menerima usulan pemerintah tentang delapan pokok pikiran tentang ketentuan peralihan untuk dibahas lebih lanjut.

Telah disepakati pula bahwa Rapat Kerja Pansus BPJS dengan Pemerintah akan kembali dilaksanakan pada Selasa, 19 Juli 2011 pukul 15.00 WIB dengan agenda pembahasan antara lain, tujuh butir prinsip dalam bab keten-

tuhan peralihan yang telah disepakati dalam Rapat Panja RUU BPJS tanggal 5 juli 2011, 46 DIM yang merupakan sisa pembahasan di Panja yang tidak terkait transformasi.

Pansus BPJS dan Pemerintah juga sepakat untuk mengusulkan perpanjangan pembahasan RUU BPJS dilanjutkan pada masa sidang selanjutnya. (sc)/foto:iw/parle.

Komisi X Dukung Pembangunan Kampus Baru Untirta

Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi Pendidikan mendukung rencana pembangunan kampus baru Universitas Tirtayasa di Serang, Banten. Pembangunan kampus baru ini dirasa mendesak karena kampus lama sudah tidak memenuhi syarat untuk menampung banyaknya mahasiswa di universitas tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar saat memimpin Tim Komisi X DPR berkunjung ke Kampus Untirta, Senin (25/7).

Rully mengatakan, melihat kondisi di lapangan dia sependapat kampus yang lama ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai tempat belajar. Selain lahannya yang kecil, kampus ini juga sudah tidak dapat menampung jumlah mahasiswa yang semakin bertambah, ditambah lagi lokasi yang berada di pinggir jalan besar, sangat tidak nyaman.

Dalam hal ini, Komisi X DPR sepakat untuk mempercepat proses rencana perluasan kampus mengingat daya tampungnya yang masih sangat terbatas dibandingkan daya tampung universitas-universitas negeri lainnya.

Keprihatinan melihat Kampus Untirta ini juga disampaikan anggota

Komisi X Dedi Suwandi Gumelar. Menurut Dedi, dia miris ditengah-tengah pesatnya pembangunan mal-mal, dan hotel-hotel di Provinsi Banten, sangat disayangkan Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten ini tidak memiliki tempat yang memenuhi persyaratan sebagai kampus.

Lahan di area kampus ini memang terlalu kecil, sehingga mahasiswa yang dapat ditampung juga jumlahnya sangat terbatas. Padahal, kata Dedi, animo masyarakat Banten untuk dapat melanjutkan kuliah di universitas tersebut sangat tinggi.

Jika dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Banten yang masih dibawah APK nasional, seharusnya Pemerintah Daerah concern untuk memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan didaerahnya.

Menurut Dedi, Komisi X DPR siap

mendorong pengembangan kampus tersebut melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Namun pemerintah pusat tidak bisa membiayai sepenuhnya karena 20 persen harus berasal dari pendanaan daerah diantaranya penyediaan lahan.

“Jika Pemprov Banten serius, maka Komisi X siap untuk mendorong anggaran dalam APBN Perubahan 2011,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Ajak Muslim mengatakan, di Banten ada 105 Perguruan Tinggi, 5 diantaranya merupakan Perguruan Tinggi Negeri dan sisanya Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Namun demikian, kata Ajak, akses lulusan SLTA yang ingin melanjutkan pendidikan di Untirta terbatas, mengingat daya tampungnya yang masih tergolong minim. Tahun 2011, jumlah pendaftar di Untirta mencapai 20.000 orang. Namun Untirta hanya menerima sekitar 10 persen atau hanya 2.400 mahasiswa. Idealnya, dari jumlah tersebut, yang diterima 40-50 persennya.

Sementara Rektor Untirta Rahman Abdullah mengatakan, saat ini luas kampus Untirta dengan jumlah mahasiswa sudah tidak rasional. Sebab kampus Untirta hanya memiliki luas sekitar 4,9 Ha, 2,7 Ha di Serang dan 2,2 Ha di Cilegon, dengan jumlah mahasiswa 17.000 orang.

Menurutnya, perluasan kampus Untirta sudah direncanakan yakni berlokasi di Sindang Heula Kabupaten Serang dengan luas lahan 28,5 Ha, yang telah dibebaskan dari 100 Ha ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Serang.

Rahman mengatakan, sesuai perencanaan tahun 2006, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kampus tersebut mencapai Rp 400 miliar.

Universitas Tirtayasa sebelumnya adalah universitas swasta dan baru menjadi universitas negeri sejak tahun 2001. Saat ini, katanya, Untirta mempunyai enam fakultas dan dia bercita-cita Untirta segera memiliki Fakultas Kedokteran. (tt) foto:tt



Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar (kanan) saat memimpin Tim Komisi X DPR berkunjung ke Kampus Untirta

DPR Desak Pemerintah Implementasikan UU No.14 Tahun 2008

“Pemerintah sebagai pelaksana UU harus memiliki langkah cepat dalam mengimplementasikan UU, karena regulasi ini harus segera diprioritaskan,” jelas anggota Komisi I DPR HM Gamari dari PKS seusa acara parlemen remaja yang diikuti 132 orang siswa-siswi terbaik se-Indonesia, di Puncak, (24/7).

Melalui era kebebasan informasi sekarang ini, lanjut Gamari, diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Indonesia. “Kemungkinan adanya penyelewengan itu bisa dikontrol karena masyarakat ikut menjaga akuntabilitas badan publik,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Kalau dilihat sekarang ini baru terbentuk satu Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat dan delapan Komisi Informasi Daerah (KID) diseluruh Indonesia.

“Terdapat 33 provinsi yang harus dibangun namun yang terbentuk di daerah baru delapan, persoalan ini sudah berjalan satu tahun. Ini harus segera dipercepat untuk membangun informasi di daerah,” Lanjutnya.

Melalui pembentukan KID, tambahnya, diharapkan dapat memfasilitasi pengelolaan informasi di daerah-

DPR mendesak pemerintah segera mengimplementasikan amanat UU No.14 tahun 2008 tentang KIP.



Anggota Komisi I DPR, HM Gamari (F-PKS) saat menjadi pembicara di acara Parlemen Remaja 2011

daerah.

Menyinggung kegiatan parlemen remaja 2011, Gamari mengatakan, kegiatan simulasi rapat DPR sangat positif dalam rangka pendidikan politik bagi pelajar. “Melalui cara ini diharapkan dapat mengembangkan kontribusi para pelajar bagi bangsa dan negara,”

paparnya.

Gamari mengatakan, melalui program ini para siswa/i dapat lebih matang saat menjalankan tugasnya nanti sebagai legislator. “Kegiatan ini patut dikembangkan frekuensinya dari waktu ke waktu,” katanya.(si)/foto:iw/parle.

Parlemen Remaja 2011 Tingkatkan Motivasi Peserta

Anggota DPR I Wayan Koster dari PDIP mengharapkan program Parlemen Remaja 2011 terus ditingkatkan programnya secara berkesinambungan.

“Melalui program Ini diharapkan dapat memberikan rangsangan motivasi bagi adik-adik kita,” jelasnya saat memberikan paparan kepada 132 peserta Parlemen Remaja 2011, di Kopo, baru-baru ini.

Menurutnya, melalui program parlemen remaja diharapkan para peserta dapat mengetahui tugas dan fungsi anggota parlemen dibidang legislasi,

anggaran maupun pengawasan.

“Mereka dapat mengetahui proses politik yang ada diparlemen, cukup mengena program ini,” tambahnya.

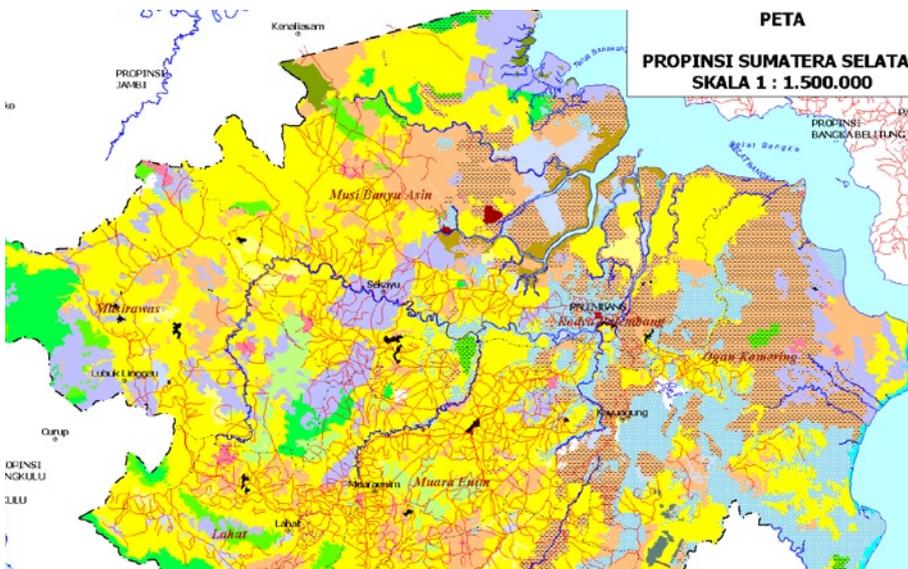
Dia meminta program ini menjadi rutinitas karena mereka dapat semakin mengenal wakil rakyatnya tidak hanya dari jarak jauh. “Kita harap dapat semakin memotivasi para adik-adik pelajar kita,” paparnya. (si)/foto: iw/parle.



Anggota DPR I Wayan Koster (F-PDIP)

Komisi VIII Beri Bantuan Rakyat Kurang Mampu Di Sumatera Selatan

Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan, Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan untuk kalangan masyarakat kurang mampu kepada pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang diterima Gubernur Sumsel, Alex Noerdin.



Bantuan itu berupa sumbangan 50 unit rumah layak huni senilai Rp 500 juta untuk warga kurang mampu di Kabupaten Lahat dan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi pelaku usaha kecil di kabupaten OKU Selatan sebesar Rp 750 juta. Selain itu, juga diberikan bantuan sosial bagi 322 warga penyandang cacat sebesar Rp 300.000 per kepala keluarga, Jaminan Sosial Usia Lanjut (JSLU) sebesar Rp 432 juta dan bantuan sosial lainnya senilai Rp 250 juta sehingga total bantuan mencapai Rp 3,91 miliar.

Dalam sambutannya ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainuddin, mengatakan pihaknya sangat peduli dan sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. Karena itulah RUU Penanganan Fakir Miskin dibuat. Ahmad Zainuddin menjelaskan, selain menyerahkan bantuan, tujuan kunjungan

kerja ke Sumsel kali ini juga ingin mengetahui kesesuaian program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan implementasinya di Sumsel. Pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan bidang agama sosial, perempuan dan anak, serta kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini di Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga ingin mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan berikutnya.

Sementara itu, Alex Noerdin mengakui masih ada 16% penduduknya yang miskin. Namun, pihaknya terus berupaya menekan angka kemiskinan itu melalui 3 prioritas utama kebijakan, yaitu melawan kebodohan, kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di sektor pendidikan, biaya pendidikan dari SD hingga SLTA sudah digratiskan. Sementara di sektor kesehatan, biaya pengobatan juga gratis untuk 7,4 juta rakyat miskin di seluruh Sumsel. Pi-

haknya juga terus meningkatkan penciptaan lapangan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan kekayaan alamnya yang sangat besar, Alex Noerdin yakin, pihaknya dapat menekan angka kemiskinan dengan cukup signifikan.

Menanggapi pertanyaan masalah kesiapan pelaksanaan ibadah haji, Alex Noerdin meyakinkan bahwa pihaknya sudah sangat siap. "Kami terus memperbaiki Asrama Haji Palembang sehingga menjadi yang terbaik di Indonesia", katanya. Mantan Bupati Muba ini juga menambahkan, saat ini daya tampung Asrama Haji di Palembang telah mencapai 1000 orang yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Pihaknya juga merencanakan untuk meningkatkan kesiapan Sumsel dengan membangun duplikasi Ka'bah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

Sementara itu, Ahmad Zainuddin, mengatakan untuk ongkos jamaah haji pada tahun sekitar Rp. 30,7 Juta. Pihaknya akan terus melakukan perbaikan dengan cara mengawasi Kementerian Agama soal penyelenggaraan haji.

Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan ini, rombongan Komisi VIII juga mengunjungi Pesantren Al-Ihsaniyah untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan para ulama, pimpinan pondok pesantren dan pemuka masyarakat untuk mendengarkan persoalan yang ada seputar pesantren. Selain itu, rombongan juga mengunjungi IAIN Raden Fatah untuk mengetahui kesiapan rencana perubahan IAIN Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri, (In) foto:in/parle

Parlemen Remaja Kawah Candradimuka Bagi Calon Pemimpin Mendatang

“Demokrasi sedang dibangun sekarang ini, karena pemberitaan banyak negatif tentang DPR di media massa, anggota dewan yang rajin dan serius bekerja menjadi luruh dengan berita negatif tentang anggota DPR,” jelasnya saat membuka Parlemen Remaja 2011 di Gedung DPR, Senin, (25/7).

Menurut Priyo, Parlemen Remaja telah dirintis. Sejak empat tahun lalu. Karena itu kita menginginkan Gedung Parlemen menjadi titik sentrum demokrasi. “Ini merupakan langkah awal, karena setiap parlemen memiliki parlemen remajanya seperti Filipina, Eropa, Asia, Cina maupun Rusia,” tambahnya.

Menurut Priyo, demokrasi harus disebarkan sejak dini bagi generasi muda Indonesia. “Parlemen remaja merupakan gerakan mendunia, menjadi parlemen remaja merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua,” lanjutnya.

Curhat kebangsaan

Pada kesempatan tersebut, Priyo menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dia menggambarkan dahulu zaman

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, Parlemen Remaja 2011 merupakan kawah candradimuka bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat membuka acara Parlemen Remaja 2011 di Gedung DPR

orba seluruh Gubernur berlatar belakang militer. “Saat zaman Soeharto beliau memimpin sentralistik, melalui reformasi kita meletakkan kembali lembaga yang ada dan mengembalikan semua pada jalurnya,” paparnya.

Sekarang apabila Presiden ingin

memilih panglima TNI juga harus berunding dan konsultasi dengan DPR, begitu juga dengan pemilihan KPK. “Melalui cara ini maka kekuatan semakin berimbang antara Pemerintah dengan DPR,” jelasnya.(si)/foto:iw/parle.



Suasana acara Parlemen Remaja 2011



Marhaban ya Ramadhan
Taqobbalallahu minna wa minkum



Keluarga Besar

DPR RI

Mengucapkan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1432 H